

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN**

(Studi Kasus Pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta**



Nama : Dwi Rahmawati

NIM : 43213110002

Program Studi Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dwi Rahmawati

NIM : 43213110002

Program Studi: S1 Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan skripsi ini apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 September 2017



DwiRahmawati

NIM : 43213110002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dwi Rahmawati

NIM : 43213110002

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah serta dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan (Studi Kasus Pada SKPD Kota Administrasi DKI Jakarta Selatan)

Tanggal Lulus Ujian : 04 Oktober 2017

Disahkan Oleh:

Pembimbing **UNIVERSITAS** Ketua Penguji

 
MERCU BUANA

Dra. Nurlis, Ak., M.Si., CA

Tanggal: 7/10/17

Dekan



Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA

Tanggal:

Diah Iskandar, SE, M.Si

Tanggal: 07-10-2017

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi



Dr. Fardinal, SE., M.Si., Ak

Tanggal:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah serta dampaknya terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Penelitian ini pertama kali dilakukan bertujuan untuk mengisyarat kandalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dra. Nurlis, Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing yang dengansabar, ikhlas dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, serta nasihat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikannya penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM. selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., AkselakuKetua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

4. Ibu Dra. Nurlis, Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing yang baik hati dan penuh kesabaran dalam memberikan arahan.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana.
6. Kedua Orang Tua dan Keluarga atas semua doa dan kasih sayang, nasihat, serta dukungan yang tak pernah berhenti menyertai dalam setiap langkahku dalam terselesaikannya skripsi ini.
7. Teman - teman 4 sekawan yang telah senantiasa menemani dan menyemangati sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Serta Seluruh Keluarga Besar Akuntansi 2013 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Jika terdapat kata dalam penulisan yang kurang benar mohon dimaafkan. Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun ke dwiiirahmawati@yahoo.com guna penyempurnaan penulisan. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi pihak lain yang membutuhkan.

Jakarta, 21 September 2017

Dwi Rahmawati

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	10
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kontribusi Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN	
HIPOTESIS	
A. Kajian Pustaka	13
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
2. Akuntabilitas Keuangan	15
3. Kualitas Pelaporan Keuangan	17
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	20
5. Pemanfaatan Teknologi informasi	26
6. Penelitian Terdahulu	29
B. Rerangka Pemikiran	33
1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33
2. Pengaruh Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	35
3. Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap	

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	36
C. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
B. Desain Penelitian.....	39
C. Definisi dan Operasionalisasi Variabel	39
1. Definisi Variabel	39
2. Operasionalisasi Variabel	42
D. Populasi dan Sampel Penelitian	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel	44
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Metode Analisis	49
1. Karakteristik Responden.....	49
2. Analisis Deskriptif.....	49
3. Uji Hipotesis	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Karakteristik Responden.....	53
B. Analisis Deskriptif	58
C. Uji Hipotesis Data	64
1. Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	65
2. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	72
D. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Keterangan	Halaman
1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011 – 2015	3
1.2 Permasalahan Utama Pengelolaan Pendapatan Daerah	5
2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	30
3.1 Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran.....	42
3.2 Daftar SKPD Kota Administrasi DKI Jakarta Selatan.....	45
3.3 Kriteria Analisis Deskriptif Presentase	50
4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	53
4.2 Tabel Pengembalian Kuesioner	55
4.3 Gambaran Umum Responden.....	56
4.4 Kriteria Analisis Deskriptif Presentase	59
4.5 Hasil jawaban responden Variabel Penerapan SAP	60
4.6 Hasil jawaban responden variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.	61
4.7 Hasil Jawaban responden variabel Kualitas Pelaporan Keuangan	62
4.8 Hasil Jawaban responden variabel Akuntabilitas Keuangan.....	63
4.9 Hasil Uji <i>Convergent Validity</i>	65
4.10 Hasil Uji <i>Construct Reability</i> dan <i>Validity</i>	66
4.11 Hasil Uji <i>Construct Reability</i> dan <i>Validity</i> (modifikasi)	67
4.12 Hasil Uji <i>Discriminant Validity (Cross Loading)</i>	68
4.13 Hasil Uji <i>Discriminant Validity (Fornell Larcker Criterion)</i>	70
4.14 Hasil Uji <i>Composite Reability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i>	71
4.15 Hasil Uji Nilai <i>R-Square</i>	73
4.16 Hasil Uji <i>Path Coefficient</i>	74

DAFTAR GAMBAR

No Keterangan	Halaman
2.1 Model Konseptual.....	38
4.1 Uji <i>Convergent Validity</i>	65
4.2 Uji <i>Convergent Validity</i> (modifikasi)	68
4.3 Hasil Uji <i>Discriminant Validity</i> (<i>Fornell Larcker Criterion</i>).....	70



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
01	Lampiran I.....	87
02	Lampiran II.....	92
03	Lampiran III.....	101
04	Lampiran IV	103
05	Lampiran V.....	107



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan. Didalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5) yang mengatur bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara maka dibentuklah suatu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Mahmudi (2010: 11) menyatakan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri relevan artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan, andal (*reliability*) artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi, dapat dibandingkan (*comparability*) artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis, dapat dipahami (*understandability*) artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Rusmana (2015) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan instansi pemerintah yang baik (Nugraeni, 2015). Kemudian laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016. LHP tersebut meliputi 81 LHP (13%) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81%) pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta 34 LHP (6%) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. IHPS II mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 542 LKPD 2015, Target opini LKPD dalam RPJMN Tahun 2015-2019, untuk tahun 2015 sebanyak 18 provinsi dan 175 kabupaten/ kota mendapatkan opini WTP.

Secara Keseluruhan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 313 (58%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 194 (36%) LKPD, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 31 (5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 4 (1%) LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada tahun 2016 terdiri atas 34 LK pemerintah provinsi, 415 LK pemerintah kabupaten, dan 93 LK pemerintah kota. Perkembangan opini LKPD berdasarkan tingkat pemda dari LKPD Tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011 - 2015

Pemerintah	Provinsi				Kabupaten				Kota			
	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
2011	30%	58%	12%	0%	9%	67%	22%	2%	23%	67%	8%	2%
2012	52%	33%	15%	0%	18%	63%	17%	2%	33%	59%	8%	0%
2013	49%	45%	6%	0%	26%	61%	10%	3%	38%	59%	3%	0%
2014	76%	21%	3%	0%	41%	50%	8%	1%	60%	40%	0%	0%
2015	85%	15%	0%	0%	54%	38%	7%	1%	65%	33%	2%	0%

Sumber : IHPS Semester 1 dan 2 tahun 2016

Namun fenomena yang terjadi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksana (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD DKI. Pemberian opini WDP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015

merupakan yang ketiga kalinya secara beruntun. Pada 2013 dan 2014, Pemprov DKI juga mendapat hasil serupa.

Menurut anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara 3 hal yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) adalah Pertama, adanya data-data yang berbeda terkait penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Kedua, belum adanya pencatatan piutang dari konversi kewajiban pengembang untuk rumah susun, serta belum mengatur pengukuran nilai aset fasilitas sosial dan fasilitas umum milik para pemegang surat izin penunjukkan penggunaan tanah (SIPPT). Ketiga, Pemprov DKI belum menggunakan sistem hak informasi akuntansi dalam pengendalian pengelolaan aset, termasuk aset tanah dalam sengketa serta data KIP (Keterbukaan Informasi Publik) belum informatif dan valid. (<http://megapolitan.kompas.com>)

Selain itu, menurut ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, hal lain yang menyebabkan DKI Jakarta memperoleh opini WDP yaitu karena Pemprov DKI Jakarta terlalu banyak mengandalkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak dimaksudkan kedalam daerah, mekanisme CSR itu diharuskan masuk kedalam kas daerah lalu didistribusikan ke sejumlah proyek terkait. Ia berpesan bahwa penggunaan dana CSR untuk pembangunan Ibu Kota sangat baik, akan tetapi sistem administrasinya masih harus diperbaiki. (<http://megapolitan.kompas.com>)

Permasalahan utama utama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima dan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD. Seperti tabel 1.2 :

Tabel 1.2

Permasalahan Utama Pengelolaan Pendapatan Daerah

PERMASALAHAN UTAMA DAN CONTOHNYA	NILAI (Rp Juta)
Penerimaan selain denda belum dipungut/ diterima	652,73
Kekurangan penerimaan atas retribusi parkir sistem gate karena adanya perbedaan nilai transaksi yang terekam pada database dengan nilai penyeteroran, serta kekurangan penerimaan atas perbedaan tarif yang dipungut dengan yang dilaporkan pada lahan/ gedung parkir di pelataran parkir Monas, gedung parkir Pasar Baru dan gedung parkir Menteng.	556,79
Sebanyak 137 penyelenggara parkir belum memiliki izin pengoperasian fasilitas parkir untuk umum dan belum membayar layanan administrasi perizinan.	95,94

Sumber : IHPS II tahun 2016

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran kepada penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, melakukan rekonsiliasi data, serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah. Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar:

1. Memberi sanksi kepada pejabat/ pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Menarik kekurangan penerimaan retribusi daerah dan perizinan pengoperasian fasilitas parkir serta menyetorkan ke kas daerah.
3. Meninjau ulang kerja sama dan mengkaji ulang persentase bagi hasil kerja sama parkir.
4. Menyusun SOP tentang pengelolaan kerja sama layanan parkir dengan pihak ketiga.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah pada 1 objek pemeriksaan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 7 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 3 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp652,73 juta.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual paling lambat dilaksanakan tahun 2008. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2010, pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan dan masih menggunakan basis kas. Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menganut basis akrual penuh. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Pemda). Pada Pasal 10 Permendagri tersebut diatur bahwa penerapan SAP berbasis akrual paling lambat tahun 2015 (IHPS II Tahun 2015).

Selain penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi juga sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Menurut Kadir & Triwahyuni (2013:2) Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah (Rhintya, 2016). Penyiapan dan pembinaan kepada pemda terkait dengan aplikasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual belum optimal antara lain kegiatan pembinaan terhadap pemda berupa forum pembahasan tidak membahas secara mendalam mengenai kesesuaian aplikasi dengan SAP dan peraturan lainnya, sehingga sistem aplikasi yang dimiliki pemda masih bermasalah.

BPK menyimpulkan tentang tata kelola TIK belum sepenuhnya efektif guna mendukung pencapaian visi dan misi Kemenkeu terutama dalam hal membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi karena masih ditemukan permasalahan antara lain: 1) Pimpinan Kemenkeu masih perlu meningkatkan komitmen dalam mengarahkan, mengevaluasi dan memonitor TIK untuk mencapai visi misi Kemenkeu dalam membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi. Permasalahan yang terjadi di antaranya Kemenkeu belum sepenuhnya mengidentifikasi kebutuhan TIK yang selaras dengan proses bisnis. Akibatnya

proses pengintegrasian sistem TIK dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara (SIMKN) menjadi satu kesatuan fungsional berisiko tidak dapat direalisasikan. 2) Struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur belum optimal untuk menggerakkan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Permasalahan yang terjadi di antaranya kebijakan strategis dan prosedur operasional TIK belum mencerminkan proses bisnis TIK yang mendukung arah kebijakan Kemenkeu di bidang informasi dan teknologi keuangan. Akibatnya, prinsip pembagian kerja berisiko tidak sejalan dengan prinsip organisasi TIK dalam hal fungsi strategi, proyek investasi, operasional, pendukung dan manajemen risiko.

Hal ini antara lain terlihat pada aplikasi yang belum dapat menghasilkan laporan keuangan, sistem aplikasi yang belum terintegrasi secara vertikal (sistem aplikasi SKPD/ Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada SKPKD/ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan horizontal (antar aplikasi dalam sistem), dan aplikasi yang belum sesuai dan/ atau tidak fleksibel menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan sistem aplikasi belum dapat menghasilkan LKPD berbasis akrual yang akurat, lengkap dan handal.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat

menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik karena masih sedikit situs web pemerintah daerah yang update mengenai informasi keuangannya.

Hasil penelitian yang dilakukan Nugraeni&M.Budiantara (2015), Pravitasari Eka Ningtyas (2015), Mia Oktarina (2016) memperlihatkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, kesimpulannya penerapan standar akuntansi pemerintah sudah efektif sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat baik. Sedangkan hasil penelitian M.Ali Fikri Biana Adha Inapty (2016) memperlihatkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan karena berdasarkan jawaban responden penerapan standar akuntansi pemerintahan masih belum maksimal dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan Rhintya Anggun (2016), Ikang Murapi (2016), Nilam Sari (2016) memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, Adanya pengaruh yang positif dapat diartikan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian Lilis Setyowati (2016) memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan artinya jika pemanfaatan teknologi informasi kurang maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun.

Selanjutnya hasil penelitian Abdus Somad (2016), Hafzan Fikrian (2017), Salomi J. Hehanussa (2015) memperlihatkan bahwa kualitas laporan keuangan

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, artinya Semakin berkualitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukhemi (2011) bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah serta dampaknya terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus pada SKPD Provinsi DKI Jakarta)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Kualitas penyajian pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan artinya semakin berkualitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas perlu di faktor-faktor yang dapat menjelaskan peningkatan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Provinsi DKI Jakarta?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah SKPD Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh pada akuntabilitas keuangan SKPD Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis dampak penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah
- b. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
- c. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas keuangan

2. Kontribusi penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

b. Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis mengenai akuntansi keuangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Akademis

Sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan khususnya pada Universitas Mercu Buana termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA